

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amala Rahmah, Country Representative Rutgers Indonesia, Buku Saku UU TPKS 12/2022.
- Bernard Arief Sidharta, *'Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat'*, Genta, Yogyakarta, 2013.
- Hans Kelsen, 2008, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Jimly Asshiddique, M. Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen tentang Hukum", Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006
- Knut D.Asplund, Suparman Marzuki dan Eko RIyadi (edit), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati, *"Ilmu Perundang-Undangan" Proses dan Teknik Pembentukannya, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Proses dan Teknik Penyusunan*, PT Kanisius, 2007, secara elektronik 2016
- Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* Buku 1, Bandung, PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Parwata, I. G. (2017). *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *"Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat"*, Institute for

Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016.

Suyanto, *“Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan”*, Cetakan-1, Unigres Press, Gresik, 2022.

Sriyana, & dkk. (2022). *Perlindungan Saksi dan Korban Untuk Penegakan Hukum*. Jakarta: LPSK.

Teguh Prasetyo, Prof. Dr. S.H. M.Si, *“Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum”*, Nusa Media, Bandung, 2016

Tardi, S. A., & dkk. (2023). *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pidato Pengukuhan dan Disertasi

A. Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, 1992

A. Hamid Attamimi, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”*, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1990, h. 352

Skripsi

Mohammad Reza Khatami, *“Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*, Skripsi, Universitas Lampung, 2023

Annisa, *“Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang”*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023

Andini Indriawati, *“Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana”*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020

Aufiyaturif Qiyah, *“Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof, KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023

Jurnal Hukum

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019

Adriaan Bredner, “An Elementary Approach to the Rule of Law”, Hague Journal on the Rule of Law, 2: 48–74, 2010

Alexandra, H. F. (2022). Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5975-5984.

Benget Hasudungan Simatupang, Clarita Wiliam, Sudirman Sitepu, pipi Susanti, Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/28848/12939> .

Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” artikel skripsi, Fakultas Hukum Unsrat <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740/22437>

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Collegium Studiosum Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta, 2023.

Kasih, D. K. (2018). “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”. *Jurnal Idea Hukum*, 836-845.

Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Risalah Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, 2021.

Nurfaqih Irfani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75194426/pdf->

[libre.pdf?1637914492=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAsas_Lex_Superior_Lex_Specialis_Dan_Lex.pdf&Expires=1717837083&Signature=Wm1wSp05erecJS9wIe6uJ~S21xcUsqfx6PPt8IoVRwLifrhKxycaGlucC8-3N0SbsPXuND8EuXVBPYnr0QY83zmMduevtjX92ui4LIW~zS7b4KqaljfnwFqFOg7jO6IH6sL~y6ZhfAG7VVGp2~A5hvVq3L5euhu7J2-QigAirmgBn2Sxm3Nl6v5FSCZlh3u3a-gwhQnQqQ8GYqzP2XErKOfGZ6LVviG3fpihNv8IzcqzXaBpPiBB4qChu78h0sLtYiUB~Va~mPrvQV~cYCXNx6tDhTsztrND5wmC4HzN68gzVG0cF7MWYRW~Vr7ks-drQC0kgeSVjXbFbQER5paBiA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA,](https://www.researchgate.net/publication/352113142/figure/fig/1637914492=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAsas_Lex_Superior_Lex_Specialis_Dan_Lex.pdf&Expires=1717837083&Signature=Wm1wSp05erecJS9wIe6uJ~S21xcUsqfx6PPt8IoVRwLifrhKxycaGlucC8-3N0SbsPXuND8EuXVBPYnr0QY83zmMduevtjX92ui4LIW~zS7b4KqaljfnwFqFOg7jO6IH6sL~y6ZhfAG7VVGp2~A5hvVq3L5euhu7J2-QigAirmgBn2Sxm3Nl6v5FSCZlh3u3a-gwhQnQqQ8GYqzP2XErKOfGZ6LVviG3fpihNv8IzcqzXaBpPiBB4qChu78h0sLtYiUB~Va~mPrvQV~cYCXNx6tDhTsztrND5wmC4HzN68gzVG0cF7MWYRW~Vr7ks-drQC0kgeSVjXbFbQER5paBiA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)

Satory, A., & Sibuea, H. P. (2020). Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. *PALAR Pakuan Law Review*, 1-27.

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 93-111.

Media Daring

Andry Novellino, “*Pengertian Hak dan Kewajiban, Perbedaan Beserta Contohnya*”, CNN Indonesia, 07 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/>

Prof. Dr Notonagoro, “*Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45*”, pada 11 Agustus 2015, <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

Sri Wiyanti Eddyono; Valentina, R., *Saya dan CEDAW*, Kompas, 2 Agustus 2004

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_mengenai_Penghapusan_Segala_Bentuk_Diskriminasi_terhadap_Wanita diakses pada 24 Mei 2024

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>

<https://vt.tiktok.com/ZSYY4KYw1/>

<https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>

<https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-59815560>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018104742/pelaku-yang-teror-dan-lecehkan-nimas-sabella-selama-10-tahun-ditangkap-polisi-berawal-dari-rp5000?page=all>

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Setjen DPR RI, Arsip DPR RI.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 2017.

Naskah Akademik penyusunan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2021, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979, entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27 (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

R. Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1981.

R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya 1981.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,

Sumber Data Lainnya

Data *real time* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 1 Januari - 17 Desember 2023,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Komnas Perempuan, #kawalsetelahlegal, Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta, 2023

Laporan Tahunan LPSK 2022, Jakarta, 2023